

PERBANDINGAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE PT.GRAHA MANDALA SAKTI DAN BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI DI WILAYAH KOTA BONTANG

Emmy Melati Sugma¹, I Ketut Gunawan², Budiman³

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengelolaan hutan mangrove wisata dan konservasi dengan melakukan perbandingan di dua lokasi yaitu PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai di Wilayah Kota Bontang. Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif, dengan alasan penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan. Selain dari pada itu, informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling menurut Namawi (2005:157) adalah teknik penentuan sampling yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab dalam setiap wawancara. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa, pertama, persamaan kedua-duanya sama-sama mengelola kawasan hutan mangrove yang untuk tujuan wisata dan konservasi. Kedua, perbedaannya, di kawasan hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti lebih memfokuskan pada tujuan wisata dan kurang memperhatikan aspek konservasi, sedangkan Balai Taman Nasional Kutai lebih mengutamakan aspek konservasi dan aspek wisatanya kurang ditangani dengan serius. Selain dari pada itu, dalam perbedaan kondisi hutan mangrove yang di kelola oleh PT. Graha Mandala Sakti lebih buruk dibandingkan dengan hutan mangrove yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai. Hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti banyak yang rusak dan mati, sementara yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai kondisinya masih tumbuh subur dan masih dikelola dengan baik.

Kata Kunci: *Hutan mangrove, pengelolaan, persamaan, perbedaan, wisata, konservasi, wilayah, kota Bontang.*

Pendahuluan

Peningkatan kegiatan sumber daya di wilayah pesisir, pantai dan laut di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Wilayah pantai dan pesisir memiliki

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: emy.melati48@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

arti yang strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik. Apabila kawasan hutan pesisir dapat dimanfaatkan lahannya dengan tepat maka sangat berpengaruh pada ekosistem alam. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya pesisir maka harus diperhatikan aspek-aspek konservasi hutan, hingga tujuan akhir pada penyelamatan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung serta meregulasi pemanfaatannya karena secara sektoral memberikan sumbangan besar dalam kegiatan ekonomi misalnya pertambangan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan lain-lain.

Wilayah pesisir merupakan ekosistem transisi yang dipengaruhi daratan dan lautan yang mencakup beberapa ekosistem, salah satunya adalah ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove adalah suatu sistem ekologi yang terdiri dari vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur.

Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya minat dan perhatian masyarakat kota Bontang dari berbagai kalangan pada kegiatan pariwisata hutan mangrove yang memanfaatkan potensi alam dari pesisir. Tentu dalam penyelenggaraan ini tidak semulus yang diduga, karena masih banyak hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pengelolaan hutan mangrove di Kota Bontang. Salah satu penyebab permasalahannya seperti lajunya pertumbuhan penduduk di Kota Bontang, lahan hutan mangrove yang dijadikan tambak ikan semakin meluas oleh masyarakat dan sampah penduduk yang mengotori di bagian pesisir hutan mangrove. Masalah ini tidak dapat dipandang sebelah mata atau dinomor duakan dalam penanganannya melainkan menjadi sebuah masalah yang cukup kompleks yang benar-benar harus diperhatikan.

Kota Bontang memiliki potensi sumber daya alam yang harus di dayagunakan secara optimal agar dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kegunaan yang diperoleh dari Hutan Mangrove, antara lain sebagai perlindungan pantai terhadap angin, ombak dan abrasi, pencegahan intrusi air laut, tanggul alam terhadap ombak dan angin, pelestarian flora dan fauna, mempertahankan habitat biota perairan sehingga Pemerintah Daerah berkepentingan menjaga kelestariannya.

Hutan mangrove Kota Bontang telah mengalami kerusakan akibat dari pemanfaatan hutan mangrove yang tak terkendali, sehingga perlu dilakukan serangkaian upaya pengelolaan secara optimal. Permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut tentu saja belum sebanding dengan slogan Kota "TAMAN" yang merupakan singkatan dari Kota Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, Nyaman. Oleh sebab itu tingkat perlindungan hutan mangrove dari pemerintah daerah maupun masyarakat otomatis juga harus lebih ditingkatkan.

Perbandingan pengelolaan wisata hutan mangrove PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai di Wilayah Kota Bontang, menjadikan

suatu kawasan wisata yang berwawasan lingkungan ekowisata yang memadukan unsur wisata dan konservasi mangrove dengan pengelolaan kawasan secara terintegrasi dan sesuai dengan konteks lingkungannya. Wisata hutan mangrove yang berlokasi di Perumahan Bukit Sekatup Damai Kelurahan Gunung Elai Bontang Utara, taman wisata hutan mangrove ini di ini dikelola oleh Perusahaan PT. Graha Mandala Sakti, dan masih dalam tahap pembangunan tetapi sudah dapat dikunjungi oleh wisatawan, pengunjung wisata juga tidak hanya masyarakat kota Bontang tetapi dari luar Kota juga banyak yang berkunjung ke sana. Adapun pengelolaan wisata hutan mangrove yang di bawah naungan Balai Taman Nasional Kutai, tepatnya di wilayah pesisir Kelurahan Bontang baru sampai Bontang Kuala, pengelolaan hutan mangrove di lokasi ini memang masih dalam tahap konservasi pengembangan wisatanya seperti pemanfaatan lahan, penanaman bibit mangrove, pelaksanaan rehabilitasi hutan mangrove, wisata hutan mangrove di Kelurahan Bontang Baru sering digunakan untuk kegiatan sekolah seperti perkemahan dan lintas alam, lain halnya di wilayah Kelurahan Bontang Kuala Bersama anggota Karang Taruna Bontang Kuala, menyisir lokasi ekowisata ini, guna melihat daya tarik yang di tawarkan yaitu Wisata hutan mangrove dan yang menjadi icon wisatanya ialah sungai belanda. Wisata ini memang belum familiar oleh masyarakat Kota Bontang, karena jalan aksesnya hanya bisa di jangkau dengan menggunakan perahu yang sudah di sediakan oleh mitra karang taruna.

Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang perbandingan pengelolaan hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove didua lokasi ini memang berbeda karena lokasi Kelurahan Gunung Elai Bukit Sekatup Damai dikelola oleh Perusahaan, sedangkan pengelolaan wisata hutan mangrove di Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Bontang Kuala di kelola oleh Balai Taman Nasional Kutai. Pada umumnya telah disadari pentingnya perhatian khusus oleh Pemerintah dalam pengelolaan hutan mangrove karena manfaatnya sangat banyak sekali untuk lingkungan dan wilayah pesisir, pengelolaan hutan mangrove yang dikelola oleh pihak swasta dan yang dikelola oleh pemerintah agar dapat mengetahui persamaan dan perbedaan kondisi dalam pengelolaannya, tetapi dalam kenyataannya masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan hutan mangrove yaitu seperti masih banyaknya sampah disekitar lokasi hutan mangrove, dan faktor utama kendalanya ialah kurangnya dana dalam pembangunan wisatanya sehingga terhambatnya dalam perbaikan hutan mangrove untuk wisata.

Pengelolaan hutan mangrove perlu menjadi perhatian khusus dari pihak swasta maupun pemerintah Kota, khususnya Balai Taman Nasional Kutai di Kota Bontang, dikarenakan besar dampaknya bagi kelestarian lingkungan, ditambah dengan kawasan hijau dibagian pesisir yang semakin lama kondisinya semakin tidak diperhatikan. Atas permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian dengan judul ini dilakukan.

Kerangka Dasar Teori

Pengelolaan Hutan Mangrove

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1997), pengelolaan adalah berasal dari kata dasar 'kelola' yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sementara itu pengelolaan berakar dari kata "kelola" dan istilah lainnya yaitu "manajemen" yang artinya ke tatalaksanaan, tata pimpinan. Bahri dan Zain (2007) bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan konsep pengelolaan lain yang berbasis sosial ekosistem yang juga telah diperkenalkan menurut Meffe *et al.*, (2002) menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi.

Menurut Arief (2003), mangrove dapat diartikan sebagai perpaduan antara kata *mangrove* (bahasa portugis) yang berarti tumbuhan dan *grove* (bahasa inggris) yang berarti belukar atau hutan kecil. Masyarakat sering menerjemahkan mangrove sebagai komunitas hutan bakau, sedangkan bakau merupakan salah satu jenis dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di hutan pasang surut tersebut.

Undang-undang No. 41 1999 hutan mangrove berasal dari dua kata yakni hutan dan mangrove, hutan adalah lapangan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Peraturan Daerah Kota Bontang No. 7 Tahun 2003 tentang hutan mangrove menyatakan bahwa hutan mangrove adalah tipe hutan yang umumnya tumbuh dan berkembang pada tanah lumpur aluvial atau lempung, gambut, berpasir yang toleran terhadap air asin di sepanjang pantai, muara sungai, delta, bagian yang terlindungi dari tanjung dan selat yang berada dalam jangkauan pasang surut (interdial) pada kawasan tropis dan subtropis.

Pengelolaan hutan mangrove tidak dilakukan secara merata karena dalam pengelolaannya, hanya dilakukan pada beberapa lokasi milik perusahaan dan pemerintah saja. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan dan mengurus suatu bidang yang berdasarkan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan disetiap kegiatan yang berbasis ekosistem dalam menjaga kelestarian hutan mangrove sehingga dapat mencapai tujuannya. Hutan mangrove adalah sekumpulan pohon-pohon tumbuhan belukar, masyarakat sering menyebutnya dengan kata lain yaitu hutan bakau, yang hidup di pasang surut air laut dan di kawasan pasir yang berlumpur. Dalam pengelolaan hutan mangrove, keberlanjutan ekosistemnya harus berjalan teratur, dengan cara memelihara dan menjaga kelestariannya.

Hutan mangrove tujuan wisata adalah sekumpulan pohon-pohon atau tumbuhan belukar, kadang masyarakat sering menyebutnya dengan kata lain yaitu hutan bakau. Hutan bakau tumbuh di daratan, pantai, dan laut, dengan terjadinya perubahan pasang surut air laut dan juga di pasir pantai yang berlumpur. Hutan mangrove dialih fungsikan untuk wisata karena wisata adalah suatu bentuk ekowisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami,

memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat, tidak hanya sebagai keuntungan perusahaan saja tetapi dalam pemanfaatan potensi kawasan mangrove menjadi sebuah alternatif dalam usaha ekosistem mangrove karena berfokus pada keutuhan wilayah alam dan pemeliharaan kondisi alam itu sendiri, karena dengan di fungsikan sebagai wisata pendapatan dari pengunjung yang datang dapat di gunakan untuk pemeliharaan hutan mangrove itu sendiri.

Hutan mangrove konservasi ialah karena sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup sumber daya manusia dan organisme yang ada didalamnya, secara langsung fungsinya sebagai daerah yang menghasilkan makanan serta sebagian organisme lain dimanfaatkan sebagai daerah pemijahan.

Haryanto R. Putro (2004:35), mendefinisikan hutan mangrove konservasi adalah proses sumber daya hutan yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi dilaksanakan melalui kegiatan perlindungan sistem penyanggah kehidupan, pengawetan keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistem secara berkelanjutan.

Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Wisata PT. Graha Mandala Sakti

Pengelolaan objek wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi sebagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Kendala pengembangan objek wisata alam berkaitan dengan antara lain: (a) Instrumen kebijaksanaan dalam pemanfaatan dan pengembangan dan fungsi kawasan untuk mendukung potensi obyek wisata alam; (b) Efektivitas fungsi dan peran obyek wisata alam di tinjau dari aspek koordinasi instansi terkait; (c) Kapasitas institusi dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan obyek wisata alam di kawasan hutan dan mekanisme peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata alam.

Pengelolaan hutan mangrove untuk tujuan konservasi dan wisata adalah proses melakukan kegiatan dan mengurus suatu bidang yang berdasarkan, pengaturan, pelaksanaan, dan penagwasan disetiap kegiatan yang berbasis ekosistem dalam menjaga kelestarian hutan mangrove sehingga dapat mencapai untuk tujuan wisata, definisi hutan mangrove itu sendiri adalah sekumpulan pohon-pohon tumbuhan belukar, masyarakat sering menyebutnya dengan hutan bakau, yang hidup di pasang surut air laut di kawasan pasir yang berlumpur dan berfungsi sebagai penahan badai atau angin kencang dari laut dalam proses melakukan kegiatan wisata edukasi hutan dan pelestarian dengan menggerakkan tenaga orang lain dalam mencapai tujuan untuk wisata alam karena selain untuk memelihara, menjaga kelestarian integritas ekosistem tujuannya untuk menjamin keberlanjutan suplai sumber daya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia. Selain dari pada itu fungsi hutan mangrove untuk tujuan wisata yaitu agar

wisatawan juga dapat memperoleh pengetahuan tentang lingkungan langsung dari alam, tidak hanya itu saja dalam pengelolaannya, kawasan hutan mangrove untuk tujuan wisata sudah dapat menyediakan fasilitas-fasilitas seperti Mushola, toilet umum, dan sarana prasarana wahana bermain, dll.

Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Konservasi Balai Taman Nasional Kutai Wilayah Kota Bontang

Pengelolaan hutan mangrove konservasi dan wisata yaitu proses kegiatan dalam mengelola hutan mangrove untuk di jadikan tempat wisata dengan melakukan tahap konservasi hutan mangrove dengan konsep pengaturan, pelaksanaan, pengawasan untuk dapat mencapai tujuan, sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Metode Penelitian

Berkenan dengan judul skripsi ini, yaitu “Perbandingan pengelolaan hutan mangrove PT.Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai di Wilayah Kota Bontang “maka penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif, dengan alasan karena penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pengelolaan hutan mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti (pengaturan, pelaksanaan, pengawasan).
2. Pengelolaan hutan mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai (pengaturan, pelaksanaan, pengawasan).
3. Persamaan dan perbedaan pengelolaan hutan mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai.
4. Perbedaan kondisi hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Hutan Mangrove Oleh PT. Graha Mandala Sakti

a. Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Wisata PT. Graha Mandala Sakti

1) Pengaturan Hutan Mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti

Pengelolaan hutan mangrove untuk di jadikan tempat wisata, salah satu bentuk pengaturannya untuk menyediakan tempat wisata yang banyak diminati oleh pengunjung, kawasan ini berada di tengah-tengah pemukiman yaitu tepatnya berdekatan dengan perumahan BSD. Tetapi kawasan taman wisata tersebut berada di tengah pemukiman bahkan berada tepat di belakang perumahan BSD, sehingga pengunjung harus menggunakan jalur perumahan tersebut, dan itu sangat membuat sebagian penduduk setempat banyak yang merasa terganggu dengan keadaan taman wisata ini.

Pengaturan pengelolaan hutan mangrove yang didasari atas pedoman perusahaan yang akan mengembangkan hutan mangrove untuk wisata. Selain itu, dalam sistem pengaturannya masih belum sempurna dan masih banyak yang belum terealisasi, dengan adanya permasalahan ini masyarakat yang berada di sekitar kawasan perumahan BSD, membuat kenyamanan mereka sangat terusik, seperti parkir liar pengunjung yang sering kedapatan parkir tepat di halaman rumah kawasan BSD itu yang menjadi permasalahan dan kendala saat ini.

2) *Pelaksanaan Hutan Mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti*

Pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove untuk tujuan wisata yang akan dilaksanakan dan sebagian sudah terlaksana. Adanya tindakan rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, lalu akan dilakukan pelaksanaan dalam pengelolaan hutan mangrove untuk tujuan wisata, kalau sudah dianggap siap. Salah satunya yaitu menyediakan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai agar dapat meningkatkan daya tarik wisatawan agar tetap berkunjung.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan dalam pengelolaan pembangunan di taman wisata hutan mangrove BSD tentu tidak akan berhasil hanya dengan upaya dari anggaran perusahaan saja. Upaya-upaya yang dilakukan harus didukung oleh semua kalangan baik pemerintah dan mitra swasta. Karena dengan hadirnya tempat wisata baru yang banyak diminati oleh wisatawan, taman wisata hutan mangrove dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan selain perusahaan PT. Graha Mandala Sakti, pemerintah juga mendapatkan hasil dari para pengunjung.

Fasilitas di Taman GMS dan Jumlah Pengunjung Wisata Tahun 2016 dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dalam pembangunan fasilitas taman wisata hutan mangrove di BSD sudah bagus dari segi penyediaan fasilitas pembangunan untuk dapat menarik minat pengunjung, seperti dalam penyediaan fasilitas seperti mushola, toilet dan gazebo sudah dapat terlihat, tetapi untuk penyediaan lahan parkir dan jalan aksesnya masih belum terlaksana. Begitupun dari peningkatan pengunjung disetiap bulannya untuk hari libur bisa mencapai 6.000 pengunjung dan untuk hari biasa mencapai 800 pengunjung.

Pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove hanya sebagian yang sudah terealisasi. Berikut adalah konsep pengaturan yang akan dilaksanakan di kawasan wisata hutan mangrove BSD. Adapun bentuk pelaksanaannya seperti, pemanfaatan lahan di kawasan wisata hutan mangrove BSD, saat ini kawasannya banyak dibangun fasilitas untuk kepentingan tempat wisata, seperti membuat gazebo, Musholla, toilet, kafe dll, akan tetapi dalam pemanfaatan lahannya tidak diimbangi dengan penanaman pohon mangrove yang baru.

3) *Pengawasan Hutan Mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti*

Dalam suatu pengelolaan hutan mangrove tujuan wisata penting adanya suatu konsep seperti pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan. PT. Graha Mandala

Sakti sudah berhasil untuk menarik minat pengunjung taman wisata mangrove di BSD, sesuai prediksi tahun 2016 pengunjung pada hari libur sudah mencapai 5.000 orang, dan pada hari biasa sekitar 700 orang. Pengunjung taman wisata mangrove BSD banyak juga yang dari luar kota Bontang, seperti dari Sangata, Samarinda, Tenggarong bahkan dari Balikpapan dan Kabupaten Paser.

Adapun konsep pengaturan yang perlu adanya tindakan pengawasan seperti, dalam pengaturan dalam pemanfaatan lahan telah terapkan pengawasan agar fasilitas yang sudah dibuat dapat rawat dan selalu menjaga dan mengawasi kawasan dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perencanaan tata ruang kawasan memang masih banyak yang belum terealisasi, akan tetapi harus ada tindakan pengawasan, seperti mengawasi setiap proses pembangunan agar pengunjung masih tetap merasa aman dan nyaman.

Sistem perijinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang di tunjuk melalui tata ruang, bentuk pengawasannya seperti mengevaluasi pelaksanaan bila mana perlu menerapkan tindakan-tindakan koreksi hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam penyaluran alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan fasilitas wisatanya perlu juga adanya tindakan pengawasan.

b. Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Konservasi PT. Graha Mandala Sakti

1) Pengaturan Hutan Mangrove Oleh PT. Graha Mandala Sakti

Pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasinya dibanding tujuan wisatanya lebih dominan dalam pembangunan dan pengembangan wisatanya. Konservasi hutan mangrove telah terbengkalai karena lebih mengutamakan infrastruktur, dan tidak memperhatikan kondisi hutan mangrovenya. Apabila dalam penggunaan batang pohon mangrove yang dimanfaatkan untuk dijadikan pagar, sebaiknya harus melakukan penanaman bibit pohon mangrove yang baru dan dan boleh saja dalam pembangunan wisatanya ditingkatkan tetapi tanpa merusak mangrovenya.

Mengenai pengaturan pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasi, dapat dijelaskan beberapa konsepnya yaitu membuat strategi agar hutan mangrovenya tidak rusak, mengatur setiap pembangunan fasilitas wisata tanpa merusak pohon mangrove. Selalu mempertahankan kondisi hutan mangrove agar tetap terjaga kelestariannya. Selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasi.

2) Pelaksanaan Hutan Mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti

PT. Graha Mandala Sakti, telah melakukan kegiatan konservasi dengan cara penanaman bibit pohon mangrove. Karena dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove perlu adanya kegiatan konservasi terlebih dahulu. Karena konservasi hutan mangrove sangat diperlukan untuk perkembangan hutan mangrove kedepannya. Pengelolaan hutan mangrove adalah proses melakukan kegiatan dan

mengurus suatu bidang yang berbasis ekosistem kelestarian hutan mangrove sehingga dapat mencapai tujuannya.

Dalam pengelolaan hutan mangrove sebelum difungsikan sebagai wisata hutan mangrove, serta keberlanjutan ekosistemnya harus berjalan teratur, dengan cara memelihara dan menjaga kelestariannya tanpa merusaknya. Selanjutnya hasil wawancara tentang bagaimana bentuk pengawasan dalam pengelolaan hutan mangrove konservasi.

3) Pengawasan Hutan Mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti

Sebelum dijadikan tempat wisata, perusahaan melakukan permohonan perizinan dan telah disetujui oleh Kelurahan Gunung Elai, dalam pengawasan untuk pengelolaan hutan mangrove. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dalam melakukan pengamatan tentang apa saja yang kurang dan apakah harus lebih dikembangkan lagi, dalam penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

pengawasan yang dibuat dengan konsep pengaturan dan pelaksanaan maka berikut ini bentuk pengawasannya yaitu, tetap melakukan pengawasan agar strategi yang dibuat tetap berjalan sesuai konsep. mengawasi proses pembangunan agar tidak merusak mangrove, menjaga kawasan konservasi hutan mangrove agar tetap terjaga dari gangguan luar dengan melakukan patroli keliling, selanjutnya mengenai pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasi.

Pengelolaan Hutan Mangrove Oleh Balai Taman Nasional Kutai

a. Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Wisata Balai Taman Nasional Kutai

1) Pengaturan Hutan Mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai

Dalam rangka melakukan pengelolaan, Balai Taman Nasional Kutai membuat konsep dan mengatur bagaimana caranya agar kawasan wisatanya banyak dikunjungi oleh wisatawan. Karena untuk setiap lokasi kawasan hutan mangrove yang akan dijadikan tempat wisata perlu adanya pengaturan khusus untuk pembangunan infrastrukturnya. Berkaitan dengan pengaturan, untuk gambar peta lokasi wisata mangrove Taman Nasional Kutai.

Kawasan hutan mangrove di Bontang Baru hingga Bontang Kuala berada jauh dari pemukiman warga bahkan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan perahu, kawasan ini masih dalam naungan yaitu salah satunya Balai Taman Nasional Kutai, hutan mangrove di Kelurahan Bontang Baru memiliki luas kawasan sekitar 230 ha dan masuk kawasan Kelurahan Bontang Kuala sekitar 387 ha. Berbiacara soal pembangunan wisatanya memang sangat lambat dikarenakan terbatasnya dana dan juga masih dalam perbaikan kawasan hutan mangrovenya yang sebagian sudah ada yang rusak.

Konsep perencanaan pengaturan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove seperti, membuat strategi khusus untuk meningkatkan jumlah pengunjung wisata hutan mangrove, yang berada di Sungai Belanda, mengembangkan konsep pembangunan fasilitas sarana dan prasarananya, dengan

menciptakan ide-ide yang menarik minat pengunjung wisatawan untuk datang, mengelola anggaran agar dapat bermanfaat sebaik mungkin untuk perbaikan fasilitas sarana dan prasarannya, membuat peraturan dan larangan barang siapa yang merusak kawasan hutan mangrove dan fasilitas yang sudah disediakan, akan dikenakan sanksi berupa denda uang. Selanjutnya mengenai pelaksanaan.

2) *Pelaksanaan Hutan Mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai*

Pelaksanaan pengembangan konservasi dan objek wisata di wilayah Kota Bontang merupakan salah satu dari sejumlah Taman Nasional lain di Indonesia yang tidak mendapat arah kebijakan yang jelas dalam pengelolaannya. Kurang seriusnya perhatian pemerintah dalam menangani hutan mangrove untuk konservasi yang berada di wilayah Kelurahan Bontang Baru dan Kelurahan Bontang Kuala, jadi menyebabkan terhambatnya dalam pelaksanaan pembangunan dalam pengelolaan objek wisatanya.

Penggunaan lokasi hutan mangrove sampai saat ini masih sering digunakan untuk kegiatan perkemahan dari sekolah. Dalam perancahan pelaksanaan pembangunan seperti penyediaan gasebo, menara pandang, barak dan jalur akses masuk ke dalam wisata mangrovenya. Untuk wisata sungai Belanda adalah salah satu tempat wisata yang di kelola oleh Mitra Karangtaruna yang bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Kutai dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Mengenai tindakan Balai TNK dalam mempromosikan jasa lingkungannya dengan melakukan beberapa kegiatan seperti pasak bumi dengan media publikasi buletin yang diterbitkan dalam 4 kali dalam setahun, selanjutnya kegiatan yang berjudul hutan tropis daratan rendah, wisata, objek wisata alam, dan mangrove tumbuhan obat, semua kegiatan tersebut diterbitkan pada tahun 2011 dan 2012 dengan media booklet, poster, billboard dan buku.

3) *Pengawasan Hutan Mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai*

Upaya yang telah dilakukan oleh tim Balai Taman Nasional Kutai dalam bentuk pengawasannya memang sudah terlaksana seperti dalam penyediaan pengamanan khusus untuk pengunjung wisatawan. Tapi dalam bentuk pengawasan tetaknya masih belum ada, karena baru akan terlaksana pada tahun ini untuk pembangunan rumah atau seperti pos penjaga kawasan wisata hutan mangrove.

Pengawasan dalam pengelolaan wisata hutan mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai. Maka penulis dapat menguraikan bentuk pengawasannya seperti, dalam setiap strategi yang telah dibuat didalam pengaturan perlu adanya tindakan pengawasan agar dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan, mengawasi setiap proses pengembangan fasilitas yang telah dibuat, selalu mengawasi agar anggaran yang keluar dapat dipertanggung jawabkan dan agar tidak disalah gunakan yang tidak sesuai dengan konsep yang sudah dibuat, melakukan pengawasan dan patroli berkeliling agar kawasan wisata hutan

mangrove di Sungai Belanda tetap terjaga dan tidak rusak. Selanjutnya mengenai pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasi.

b. Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Konservasi Balai Taman Nasional Kutai

1) Pengaturan Hutan Mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai

Pengaturan pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasi yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dalam bentuk konsep, dengan melakukan pembinaan dan penelitian untuk dapat mengembalikan kawasan mangrove yang akan rusak dan juga mengatur setiap kegiatan penelitian dalam konservasi agar berjalan lancar dan maksimal.

konsep pengaturan kawasan konservasi seperti, perencanaan dalam mengelola kawasan hutan mangrove agar tetap subur dan tidak rusak, pembinaan dalam mengelola kawasan konservasi agar berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan, mengatur pemanfaatan lahan kawasan konservasi hutan mangrove, selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove tujuan konservasi.

2) Pelaksanaan Hutan Mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai

Dalam melakukan kegiatan Konservasi pemerintah Balai Taman Nasional Kutai bekerja sama dengan beberapa Mitra yang ada di Kalimantan Timur khususnya dari perusahaan yang ada di Kota Bontang yang lebih banyak ikut berperan dalam penanganan kawasan Taman Nasional Kutai. Berikut ini adalah beberapa uraian anggota Mitra dalam pengelolaan infrastruktur pengembangan kawasan Taman Nasional Kutai.

Mengenai pelaksanaan, maka penulis dapat memaparkan beberapa pelaksanaannya seperti, tetap melakukan konservasi dengan cara perawatan pohon mangrove agar tetap subur, melakukan pembinaan kepada pengelola di lapangan agar kawasan konservasi tetap berjalan sesuai konsep yang telah dibuat, mengatur pemanfaatan lahan dengan melakukan penanaman pohon mangrove yang baru, selanjutnya tentang pengawasan hutan mangrove tujuan konservasi.

3) Pengawasan Hutan Mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai

Bentuk pengawasan yang sudah dilakukan seperti melakukan pengawasan setiap kegiatan konservasi, pembinaan dalam pengelolaan kawasan konservasi maka perlu dilakukan pengawasan agar berlangsung lancar tanpa adanya kendala, mengawasi setiap kegiatan konservasi penanaman bibit pohon mangrove baru agar dapat bertahan dan tumbuh subur. Selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan pengelolaan hutan mangrove tujuan wisata dan konservasi.

Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan Hutan Mangrove Tujuan Wisata dan Konservasi

a. Persamaan Pengelolaan Hutan Mangrove PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai

Ada kesamaan dalam pengelolaan hutan mangrovenya, karena PT. Graha Mandala Sakti selain untuk merawat mangrove juga memanfaatkan kawasan untuk dijadikan tempat wisata. Selanjutnya tentang persamaan pengelolaan hutan mangrove Balai Taman Nasional Kutai dan PT. Graha Mandala Sakti, memiliki persamaan dalam pengelolaan hutan mangrovenya, selain merawat dan melestarikan mangrove, mempunyai tujuan untuk menjadikan tempat wisata.

Dapat dianalisa bahwa PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai sudah menjelaskan apa saja bentuk persamaannya. Sekilas dalam kebijakan pengelolaan hutan mangrove dibuat hanya untuk kegiatan perbaikan saja, karena kawasan hutan mangrovenya sebagian sudah rusak. Namun, jika dianalisa ada terdapat persamaan dalam tuannya.

b. Perbedaan Pengelolaan Hutan Mangrove PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai

Dalam perbedaannya dapat dianalisa bahwa PT. Graha Mandala Sakti lebih unggul dalam pengelolaan wisatanya tetapi pengelolaan konservasinya masih belum dilakukan dengan baik karena adanya kegiatan pemangunan untuk wisata, dapat dilihat dari pembangunan fasilitasnya yang sudah sangat memadai sehingga membuat kawasan wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan. Selanjutnya perbedaan pengelolaan hutan mangrove Balai Taman Nasional Kutai karena lebih unggul dalam pengelolaan konservasinya karena kondisi hutan mangrovenya masih sangat terawat tetapi dalam pengelolaan wisatanya memang belum berjalan semua, kendalanya karena kurangnya dana dari Pemerintah.

Perbedaan dapat dipahami sebagai suatu bentuk konsep dari objek yang satu dengan objek yang lainnya. Sekilas dari perbedaan pengelolaan hutan mangrove yang dikelola oleh perusahaan PT. Graha Mandala Sakti dan pemerintah Balai Taman Nasional Kutai terdapat beberapa tujuan yaitu kegiatan pengelolaan untuk wisata dan juga konservasi.

Perbedaan Kondisi Hutan Mangrove Tujuan Wisata dan Konservasi

Untuk kondisi hutan mangrove kawasan wisata BSD dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti, lebih bagus dari segi tujuan wisatanya. karena dari pembangunannya yang sangat menarik pengunjung serta setiap beberapa bulan selalu mengalami perubahan-perubahan agar pengunjung tidak bosan dan untuk kondisi hutan mangrove kawasan konservasi Sungai Belanda yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai hutannya lebih terawat, karena kondisi hutannya yang masih bagus dan hanya sekitar 5% saja yang terjadi kerusakan maka tujuan konservasinya telah berhasil.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan hutan mangrove oleh PT. Graha Mandala Sakti memiliki dua aspek yaitu wisata dan konservasi. Untuk aspek wisatanya sudah berjalan

sangat baik karena dapat terlihat dari pembangunan fasilitasnya yang sudah memadai tetapi untuk lahan parkirnya yang kurang. Dalam aspek konservasi hutan mangrovenya yang masih kurang mendapat perhatian atau kurang lebih dipelihara.

2. Adapun pengelolaan hutan mangrove oleh Balai Taman Nasional Kutai memiliki dua aspek yaitu wisata dan konservasi. Untuk aspek wisatanya belum berjalan sempurna dikarenakan kurangnya dana dari pemerintah, sehingga lambatnya pengerjaan pembangunan seperti sarana dan fasilitasnya. Dalam aspek konservasi berjalan dengan baik, karena masih mmendapat perhatian khusus, dapat dilihat masih banyak terdapat jenis-jenis mangrove disana.
3. Ada persamaan dan perbedaan pengelolaan hutan mangrove antara PT.Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai. Persamaannya, keduanya sama-sama mengelola kawasan hutan mangrove yang diperuntukkan untuk tujuan wisata dan konservasi. Perbedaannya, di kawasan hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti lebih memfokuskan diri pada tujuan wisata dan kurang memperhatikan aspek konservasi, sedangkan Balai Taman Nasional Kutai lebih mengutamakan aspek konservasi dan aspek wisatanya kurang ditangani dengan serius.
4. Ada perbedaan kondisi hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti dan Balai Taman Nasional Kutai. Kondisi hutan mangrove yang di kelola oleh PT. Graha Mandala Sakti lebih buruk dibandingkan dengan hutan mangrove yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai. Hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti banyak yang rusak dan mati, sementara yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai kondisinya masih tumbuh subur dan dikelola dengan baik.

Saran

1. Mengingat dalam pengeloaan kawasan hutan mangrove PT. Graha Mandala Sakti, asilitas parkirnya kurang luas, maka sebaiknya segera memperluas lahan parkir untuk kepentingan wisata sehingga pengunjung tidak menggunakan halaman pemukiman disekitar kawasan perumahan BSD. Untuk aspek konservasi sebaiknya pengelola membuat kegiatan yang tidak mementingkan aspek wisata saja, dan lebih memperhatikan kawasan hutan dengan penanaman bibit pohon mangrove dan merawatnya agar dapat tumbuh kembali dengan subur.
2. Oleh karena mengingat dalam aspek wisatanya belum berjalan sempurna dikarenakan minimnya dana, maka sebaiknya Balai Taman Nasiona Kutai, segera melanjutkan pembangunanan yang sempat terhenti, agar kawasan hutan mangrove banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sementara dari aspek konservasi dapat diketahui telah berjalan dengan baik, akan tetapi sebaiknya harus ada strategi khusus yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Kutai untuk mempertahankan agar hutan mangrove tetap terjaga kelestariannya.

3. Oleh karena PT. Graha Mandala Sakti kurang dalam memperhatikan aspek konservasi dalam pengelolaan hutan mangrove, maka PT. Graha Mandala Sakti mestinya mulai memperhatikan aspek konservasi dengan menanam pohon mangrove kembali. Pemerintah sebaiknya juga menekankan pihak PT. Graha Mandala Sakti untuk merenovasi kawasan mangrove. Untuk Balai Taman Nasional Kutai kurang memperhatikan aspek wisatanya, dari segi fasilitas dan infrastrukturnya, maka sebaiknya pemerintah dan Balai Taman Nasional Kutai lebih mempercepat pembangunan fasilitasnya agar banyak dikunjungi oleh wisatawan, dalam upaya penanganan konservasi memang sudah berjalan dengan baik tetapi sebaiknya pihak pengelola lebih ditingkatkan lagi dalam perawatan pohon mangrovenya agar tetap terjaga dan tidak rusak.
4. Mengingat kondisi hutan mangrove yang dikelola oleh PT. Graha Mandala Sakti lebih buruk dari yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Kutai. Maka PT. Graha Mandala Sakti melakukan penanaman baru untuk kawasan konservasi hutan mangrovenya, selanjutnya Balai Taman Nasional Kutai, saat ini kondisi hutannya masih bagus karena masih banyak terdapat banyak jenis-jenis mangrovenya, akan tetapi saran saya sebaiknya pemerintah harus mempertahankan kondisi hutannya agar tidak rusak.

Daftar Pustaka

- Arifin, Tahir. 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*: ALFABETA, cv Jl. Gegerkalong Hilir No. 84 Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2006. *Pengelolaan*, Surabaya : Kartika. Kasim M. 2006 Kawasan Mangrove dan Konsep Ecotourism. Coastal dan Marine Information.<http://marufkasim.blog.com> (Online) diakses tanggal 29 Desember 2009.
- Koryati, 2004: *16, Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*, Yogyakarta: YP API.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 167).
- Pengaturan Taman Nasional Kutai Sebagai Kawasan Hutan Konservasi Terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.